



---

**KLIPING DIGITAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN**

**31 Agustus – 01 September 2023**

---



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

01 / 09 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	<b>TANGGAL</b>  <b>MEDIA</b>    <b>JUDUL</b>  <b>NARASUMBER</b>    <b>RESUME</b>	<p>Kamis, 31 Agustus 2023</p> <p><a href="https://www.kompas.com/properti/read/2023/08/31/093000821/pembangunan-rumah-hijau-dan-terjangkau-bakal-dikawal-kementerian-pupr">https://www.kompas.com/properti/read/2023/08/31/093000821/pembangunan-rumah-hijau-dan-terjangkau-bakal-dikawal-kementerian-pupr</a> Berita Terkait: <a href="https://artikel.rumah123.com/program-rumah-hijau-murah">https://artikel.rumah123.com/program-rumah-hijau-murah</a> <a href="https://www.kompas.com/properti/read/2023/08/31/100000321/skema-igahp-disiapkan-pemerintah-harap-investor-ikut-andil">https://www.kompas.com/properti/read/2023/08/31/100000321/skema-igahp-disiapkan-pemerintah-harap-investor-ikut-andil</a></p> <p>Pembangunan Rumah Hijau dan Terjangkau Bakal Dikawal Kementerian PUPR</p> <p>Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Haryo Bakti Martoyoedo Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna</p> <p>Pembangunan rumah subsidi bakal didorong ke arah yang lebih hijau. Untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga dan mengantisipasi adanya tindak green washing dari pengembang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan pengawasan. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Haryo Bakti Martoyoedo mengatakan perumahan subsidi merupakan sektor yang paling mudah untuk menerima konsep green housing karena seluruh aspeknya telah diatur. Terlebih pada tahun ini target Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai sekitar 220.000 unit rumah. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan pemerintah tengah menggodok skema Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGAHP). Ditargetkan skema pembiayaan rumah hijau dan terjangkau ini bisa dirilis pada tahun 2024 mendatang.</p>	+



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

01 / 09 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

2	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b> <b>JUDUL</b> <b>NARASUMBER</b> <b>RESUME</b>	<p>Kamis, 31 Agustus 2023</p> <p><a href="https://www.innalar.com/regional/36710000998/diproyksikan-2024-jembatan-hubungkan-batam-bintan-hutang-rp-44-triliun-pamor-atau-kebutuhan">https://www.innalar.com/regional/36710000998/diproyksikan-2024-jembatan-hubungkan-batam-bintan-hutang-rp-44-triliun-pamor-atau-kebutuhan</a></p> <p>Diproyksikan 2024, Jembatan Hubungkan Batam-Bintan Hutang Rp 4,4 Triliun, Pamor atau Kebutuhan?</p> <p>Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna</p> <p>Proyek <u>Jembatan Batam-Bintan</u> akan dibangun melalui program Kerjasama Pemerintah-Bisnis (KPBU). Selain itu, proyek ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan proyek <u>Jembatan Batam-Bintan</u> masuk dalam daftar proyek KPBU tahun ini. Sedangkan investasi pembangunan <u>Jembatan Batam-Bintan</u> sebesar Rp 14,74 triliun.</p>	+
3	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b> <b>JUDUL</b> <b>NARASUMBER</b>	<p>Kamis, 31 Agustus 2023</p> <p><a href="https://www.ngopibareng.id/read/infrastruktur-ketersediaan-air-pupr-dorong-kolaborasi-swasta">https://www.ngopibareng.id/read/infrastruktur-ketersediaan-air-pupr-dorong-kolaborasi-swasta</a></p> <p>Infrastruktur Ketersediaan Air, PUPR Dorong Kolaborasi Swasta</p> <p>Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna</p>	+



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

01 / 09 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

	<b>RESUME</b>	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bidang Sumber Daya Air (SDA) untuk meningkatkan kerja sama atau kolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan infrastruktur guna pengelolaan air yang lebih baik dan berkelanjutan. Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah mengatakan salah satu tantangan dalam pengelolaan sumber daya air adalah kemampuan pendanaan pemerintah yang terbatas dan terdapat funding gap. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan, permasalahan air merupakan isu yang besar, dibandingkan dengan sektor lain, sektor air memerlukan perhatian khusus, dimulai dari kepastian tarif, koordinasi antar stakeholder dan juga perlu perubahan pendekatan kaitannya dengan bundling agar menciptakan ekonomi sirkular.	
4	<b>TANGGAL</b>  <b>MEDIA</b>  <b>JUDUL</b>  <b>NARASUMBER</b>  <b>RESUME</b>	Kamis, 31 Agustus 2023  <a href="https://serayunews.com/pembebasan-lahan-tol-getaci-sampai-mana-prioritas-2024-dibangun-sampai-ciamis">https://serayunews.com/pembebasan-lahan-tol-getaci-sampai-mana-prioritas-2024-dibangun-sampai-ciamis</a>  Pembebasan Lahan Tol Getaci Sampai Mana? Prioritas 2024 Dibangun Sampai Ciamis  Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna  Getaci bakal menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia jika sudah selesai dikerjakan. Pemerintah merancang jalan tol itu dibangun sepanjang 206,65 kilometer. Meski begitu, ada perubahan rencana pembangunan proyek tersebut. Kementerian PUPR memutuskan akan membangun jalan tol sampai Ciamis, Jawa Barat. Proses konstruksi diagendakan bakal dikerjakan pada awal tahun 2024. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna menargetkan (akhir) tahun ini, kalau bisa lebih awal. Kita kejar tahun ini harusnya proyek Tol Getaci bisa lelang. Dirinya juga menyampaikan bahwa ruas yang dilelang untuk tahap pertama adalah Gedebage-Ciamis. Sedangkan proses pembebasan lahan tol sudah terlaksana sampai Garut Utara.	+
5	<b>TANGGAL</b>	Jumat, 01 Agustus 2023	



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

01 / 09 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

<b>MEDIA</b>	<a href="https://beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1337065254/proyek-rusun-cisaranten-bandung-dibangun-mulai-2024-tahap-pertama-dapat-dihuni-di-2025">https://beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1337065254/proyek-rusun-cisaranten-bandung-dibangun-mulai-2024-tahap-pertama-dapat-dihuni-di-2025</a>	+
<b>JUDUL</b>	Proyek Rusun Cisaranten Bandung Dibangun Mulai 2024, Tahap Pertama Dapat Dihuni di 2025	
<b>NARASUMBER</b>	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR R Haryo Bakti Martoyoedo	
<b>RESUME</b>	Proyek <u>Rusun Cisaranten</u> Bina Harapan yang merupakan kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat akan mulai dibangun pada tahun 2024. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR R Haryo Bakti Martoyoedo mengatakan proyek ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dirinya mengatakan bahwa rencananya rusun ini akan dibangun sebanyak 1.879 unit, termasuk delapan unit ramah difabel, yang diperuntukkan bagi warga Bandung yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Warga yang membeli unit hunian ini akan menerima Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang merupakan kepemilikan atas unit seperti rusun di atas barang milik negara, dengan jangka waktu tertentu yakni 60 tahun yang dapat diperpanjang 30 tahun.	



31 / 08 / 2023

Sumber: Kompas.com

---

## **Pembangunan Rumah Hijau dan Terjangkau Bakal Dikawal Kementerian PUPR**

Penulis: Aisyah Sekar Ayu Maharani

Editor: Hilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan rumah subsidi bakal didorong ke arah yang lebih hijau.

Untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga dan mengantisipasi adanya tindak green washing dari pengembang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan pengawasan.

"Sebenarnya peraturannya sudah ada kan, ya nanti pengawasannya iya," ujar Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Haryo Bakti Martoyoedo saat ditemui usai acara Neighborhood Densification di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Menurut Haryo, perumahan subsidi merupakan sektor yang paling mudah untuk menerima konsep green housing karena seluruh aspeknya telah diatur.

Terlebih pada tahun ini target Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai sekitar 220.000 unit rumah.

"Dengan alokasi tadi, kita dorong nantinya dengan konsep-konsep yang memang green," imbuh Haryo.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna

mengatakan pemerintah tengah menggodok skema Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGAHP).

Ditargetkan skema pembiayaan rumah hijau dan terjangkau ini bisa dirilis pada tahun 2024 mendatang.

"Blue book tahun ini, ini lagi disiapkan bahan green book-nya. Ya mudah-mudahan 2024 sudah bisa launching," ucap Herry pada kesempatan yang sama.

Sementara blue book adalah tahapan di mana proposal proyek tertentu sudah disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan green book adalah tahapan persetujuan pemberian dana untuk proyek tersebut.

Langkah ini merupakan upaya mengubah ekosistem perumahan menuju nol emisi bersih dan mencapai target perubahan iklim.

<https://www.kompas.com/properti/read/2023/08/31/093000821/pembangunan-rumah-hijau-dan-terjangkau-bakal-dikawal-kementerian-pupr>

Berita Terkait:

<https://artikel.rumah123.com/program-rumah-hijau-murah>



**KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN**

---

31 / 08 / 2023

| Sumber: Kompas.com

---

<https://www.kompas.com/properti/read/2023/08/31/100000321/skema-igahp->

[disiapkan-pemerintah-harap-investor-ikut-andil](#)



31 / 08 / 2023

Sumber: innalar.com

---

## **Diproyeksikan 2024, Jembatan Hubungkan Batam-Bintan Hutang Rp 4,4 Triliun, Pamor atau Kebutuhan?**

Editor: Arina Nihayati

**inNalar.com** - Proyek Jembatan Batam-Bintan akan dibangun melalui program Kerjasama Pemerintah-Bisnis (KPBU).

Selain itu, proyek ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pembangunan jembatan penghubung Batam-Bintan ini turut mengambil hutang. Namun, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengungkapkan alasannya.

Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pengelola Proyek Kerja Sama Jembatan Batam-Bintan (PJPK) kini tengah melakukan percepatan proyek tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan proyek Jembatan Batam-Bintan masuk dalam daftar proyek KPBU tahun ini.

Sedangkan investasi pembangunan Jembatan Batam-Bintan sebesar Rp 14,74 triliun.

Ansar Ahmad mengatakan, pembangunan jembatan Batam-Bintan juga sejalan dengan rencana pusat untuk menjadikan Kepri menjadi Kawasan Strategis Perekonomian Nasional (KSPN).

Ansar sangat yakin, Jembatan Batam-Bintan bukan hanya impian

masyarakat Kepri, tapi juga impian besar seluruh negara Indonesia.

Sebab, dengan adanya infrastruktur yang baik di kawasan perbatasan akan meningkatkan supremasi negara ini dibandingkan negara lain.

Ansar mengungkapkan, Kepri berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Dengan adanya jembatan ini tentunya akan meningkatkan pamor Indonesia terhadap negara tetangga tersebut.

Dari segi manfaat, jembatan Batam-Bintan tentunya dapat memperlancar pergerakan kendaraan, barang, orang dan jalur kedua kawasan tersebut.

Muaranya akan menggerakkan perekonomian masyarakat, yang kemudian berdampak pula pada wilayah lain di sekitarnya.

Ansar juga menjelaskan, pemerintah mendapat pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk membiayai proyek ini senilai \$300 juta atau Rp 4,4 triliun.

Jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia, mencapai 14,74 km. Dibangun melalui program kemitraan pemerintah-bisnis (KPS).

Selain itu, proyek ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.





## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

31 / 08 / 2023

Sumber: innalar.com

---

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pimpinan Proyek Kerjasama Jembatan Batam-Bintan (PJPK) saat ini sedang melakukan percepatan proyek tersebut bekerjasama dengan pemerintah provinsi nusantara.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan proyek Jembatan Batam-Bintan masuk dalam daftar proyek KPBU tahun ini.

Berdasarkan informasi yang dimuat di situs resmi Kementerian Keuangan,

proyek Jembatan Batam-Bintan diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi biaya logistik antara Pulau Batam dan Pulau Bintan.

Selain itu, juga akan mengefektifkan mobilitas kendaraan dari dua wilayah Kepri tersebut.

<https://www.innalar.com/regional/36710000998/diproyksikan-2024-jembatan-hubungkan-batam-bintan-hutang-rp-44-triliun-pamor-atau-kebutuhan>



31 / 08 / 2023

Sumber: ngopibareng.id

---

## **Infrastruktur Ketersediaan Air, PUPR Dorong Kolaborasi Swasta**

Editor: Dyah Ayu Pitaloka

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bidang Sumber Daya Air (SDA) untuk meningkatkan kerja sama atau kolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan infrastruktur guna pengelolaan air yang lebih baik dan berkelanjutan.

Inovasi pembiayaan alternatif tanpa membebani anggaran negara perlu dieksplorasi, untuk mendukung penanganan permasalahan air baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah mengatakan salah satu tantangan dalam pengelolaan sumber daya air adalah kemampuan pendanaan pemerintah yang terbatas dan terdapat funding gap.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan APBN hanya sekitar 30 persen, sehingga kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi hal penting untuk memenuhi funding gap sektor sumber daya air.

"Kami mendorong kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha dalam penyediaan sumber daya air. Kami mengarahkan kebijakan dan tindakan kami pada prinsip-prinsip baru dan kolektif serta melaksanakannya secara kolaboratif," kata Sekjen Zainal Fatah dalam acara Indonesia Infrastructure Roundtable Ke-25 yang digelar di

Universitas Brawijaya, Malang, Rabu 30 Agustus, 2023.

Acara Indonesia Infrastructure Roundtable Ke-25 ini sebagai bagian dari side event Sustainable Water Finance Subtheme, Road to the 10 th World Water Forum yang diselenggarakan di Bali tahun 2024. Diskusi yang mengambil tema 'Amplifying Partnership a Collaborative Drive to Strengthen Indonesia's Water Sector' tersebut menjadi substansi yang akan dibahas dalam WWF tahun 2024, sehingga diharapkan dapat mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dan berkomitmen dalam pembiayaan sektor air.

"Kita akan mengeksplorasi berbagai model pembiayaan yang dapat mengatasi hambatan finansial, teknis, dan kelembagaan yang kita hadapi dan menemukan inspirasi untuk pengembangan dalam inovasi pembiayaan sektor sumber daya air," kata Zainal Fatah.

Menurut Zainal Fatah, innovative water financing menjadi isu dasar untuk menjamin ketersediaan air, baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, pada WWF 2024 nanti diharapkan juga dapat menghasilkan sesuatu solusi bersama yang bisa disepakati di level dunia untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam pengelolaan air.

"Ada hal penting yang menjadi perhatian kita bahwa kolaborasi dan kerjasama yang tidak dibatasi oleh batas-batas



31 / 08 / 2023

Sumber: ngopibareng.id

administratif, tetapi kita membuka diri untuk melakukan kolaborasi secara global antar negara dan tentu dengan multilateral development institution agar kita dapat mengambil manfaat yang lebih luas dari best perspektif yang telah ada dan dialami oleh mereka lebih dulu," kata Zainal Fatah.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan, permasalahan air merupakan isu yang besar, dibandingkan dengan sektor lain, sektor air memerlukan perhatian khusus, dimulai dari kepastian tarif, koordinasi antar stakeholder dan juga perlu perubahan pendekatan kaitannya dengan bundling agar menciptakan ekonomi sirkular.

"Kendala utama dalam mencapai water for all adalah kesenjangan kebutuhan pendanaan dengan anggaran publik yang tersedia. Data menunjukkan terdapat funding gap untuk sektor air sebesar 70,4% dari 41 negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendanaan

merupakan tantangan yang dihadapi secara global," kata Herry TZ.

Untuk itu, Herry menyampaikan kolaborasi merupakan kunci untuk memenuhi funding gap tersebut. Kemitraan yang melibatkan keuangan internasional hingga pihak swasta dapat memunculkan inovatif solutif untuk menyediakan infrastruktur air yang berkelanjutan.

"Skema KPBU di sektor air yang telah berjalan di Indonesia masih dibutuhkan penyempurnaan agar sustainable dan mampu lebih banyak menarik investasi," kata Herry TZ.

Turut hadir, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) M Wahid Sutopo dan Wakil Rektor Universitas Brawijaya Widodo.

<https://www.ngopibareng.id/read/infrastruktur-ketersediaan-air-pupr-dorong-kolaborasi-swasta>



31 / 08 / 2023

Sumber: serayunews.com

---

## **Pembebasan Lahan Tol Getaci Sampai Mana? Prioritas 2024 Dibangun Sampai Ciamis**

**SERAYUNEWS** – Proses pembebasan lahan Tol Getaci sampai mana? Simak progres pembangunan jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) yang diprioritaskan Pemerintah.

Pembangunan jalan tol di wilayah Jawa Barat ini masih dalam proses pra konstruksi. Salah satunya adalah pembebasan lahan untuk proyek tol.

Rencananya akan dibangun dari Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Getaci bakal menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia jika sudah selesai dikerjakan. Pemerintah merancang jalan tol itu dibangun sepanjang 206,65 kilometer.

Meski begitu, ada perubahan rencana pembangunan proyek tersebut. Kementerian PUPR memutuskan akan membangun jalan tol sampai Ciamis, Jawa Barat. Proses konstruksi diagendakan bakal dikerjakan pada awal tahun 2024.

“Ditargetkan (akhir) tahun ini, kalau bisa lebih awal. Kita kejar tahun ini harusnya proyek Tol Getaci bisa lelang,” ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Herry menyampaikan ruas yang dilelang untuk tahap pertama adalah Gedebage-Ciamis. Sedangkan proses pembebasan lahan tol sudah terlaksana sampai Garut Utara.

Jalan tol tersebut akan membentang dari Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap melewati Garut hingga Pangandaran. Hal ini menjadi solusi tepat untuk mengatasi kemacetan di wilayah tersebut.

### **Kecamatan dan Desa di Garut yang Tergusur**

Setidaknya ada 37 desa yang tersebar di 7 kecamatan yang bakal dilewati jalan tol. Warga akan mendapatkan uang ganti rugi (UGR) dari pemerintah.

Lantas mana saja kecamatan dan desa di Garut yang akan tergusur pembangunan jalan tol Getaci? Berikut informasinya

### **Kecamatan Kadungora**

Desa Karangtengah

Desa Hegarsari

Desa Mandalasari

Desa Karangmulya

Desa Talagasari

### **Kecamatan Banyuresmi**

Desa Sukakarya

Desa Sukalaksana

Desa Sukamukti

Desa Sukaratu



# KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

31 / 08 / 2023

| Sumber: serayunews.com

---

Desa Pamekarsari

Desa Lebakjaya

Desa Sukasenang

**Kecamatan Cilawu**

**Kecamatan Leles**

Desa Ngamplang

Desa Kandangmukti

Desa Pasanggrahan

Desa Leles

Desa Cilawu

Desa Cangkuang

Desa Sukamaju

Desa Margaluyu

Desa Ngamplangsari

Desa Sukarame

Desa Karyamekar

**Kecamatan Leuwigoong**

Desa Dayeuhmanggung

Desa Margacinta

Desa Sukatani

**Kecamatan Karangpawitan**

**Kecamatan Garut Kota**

Desa Mekarsari

Desa Sukanegla

Desa Tanjungsari

Desa Cimuncang

Desa Lebak Agung

Desa Margawati

Desa Lengkongjaya

Desa Kota Kulon

Desa Suci

<https://serayunews.com/pembebasan-lahan-tol-getaci-sampai-mana-prioritas-2024-dibangun-sampai-ciamis>

Desa Karangmulya



01 / 09 / 2023

Sumber: pikiranrakyat.com

---

## **Proyek Rusun Cisaranten Bandung Dibangun Mulai 2024, Tahap Pertama Dapat Dihuni di 2025**

Editor: Tommy MI Pardede

**BERITA SUBANG -** Proyek Rusun Cisaranten Bina Harapan yang merupakan kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat akan mulai dibangun pada tahun 2024.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR R Haryo Bakti Martoyoedo mengatakan proyek ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Proyek Rusun Cisaranten Bina Harapan akan mulai konstruksi pada 2024 dan diestimasikan tahap pertama dapat dihuni pada 2025. Bandung jadi pilot project hunian KPBU ini," kata Haryo dalam keterangannya, di Bandung, Rabu.

Haryo mengatakan bahwa rencananya rusun ini akan dibangun sebanyak 1.879 unit, termasuk delapan unit ramah difabel, yang diperuntukkan bagi warga Bandung yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Rusun ini diperuntukkan warga Bandung, sudah disiapkan lima tower dengan 1.879

unit. Ketika kurang, nanti mudah-mudahan Pak Menteri (PUPR) bisa menambah lagi, karena memang masih ada lahan di sebelahnya," ujar Haryo.

Lebih lanjut, Haryo mengatakan bahwa dalam rapat Sosialisasi Proyek KPBU Rusun Cisaranten pada Selasa (29/8), di Grand Tjokro Premiere Bandung, warga yang membeli unit hunian ini akan menerima Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang merupakan kepemilikan atas unit seperti rusun di atas barang milik negara, dengan jangka waktu tertentu yakni 60 tahun yang dapat diperpanjang 30 tahun.

Warga yang bisa memiliki rusun ini, kata Haryo, adalah masyarakat umum yang berdomisili di Kota Bandung dengan berpenghasilan minimal Rp4 juta, dan surat pernyataan belum mempunyai rumah, bisa mendapatkan rumah susun tipe studio dengan cicilan mulai dari Rp1,35 juta per bulan.

<https://beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1337065254/proyek-rusun-cisaranten-bandung-dibangun-mulai-2024-tahap-pertama-dapat-dihuni-di-2025>